

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah penggalan penting dalam pembangunan nasional dengan intensi utamanya yakni guna mencapai pertumbuhan yang optimal dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi karena pembangunan ekonomi dapat menunjang pertumbuhan ekonomi begitupun sebaliknya, sementara pertumbuhan ekonomi juga mempercepat metode pembangunan ekonomi (Kamaroellah, 2024).

Proses pembangunan selalu terkait dengan kondisi kependudukan. Memahami perilaku penduduk adalah langkah penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan penduduk, salah satunya terkait dengan keputusan untuk melakukan mobilitas. Oleh sebab itu, untuk mengetahui dampak pembangunan terhadap pola mobilitas tenaga kerja di Indonesia, kajian tentang mobilitas penduduk sangat penting (Hutajulu et al., 2024).

Komponen yang mendukung pembangunan ekonomi suatu negara khususnya kuantitas dan kualitas memainkan peran penting pada tahap tertentu dalam proses pembangunan, seperti sejak reformasi dan keterbukaan dimulai, pembentukan modal dan dividen demografi telah berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat. Tiongkok telah mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi yang memiliki keunggulan khusus. Basis pembangunan ekonominya tercermin dalam banyak hal, seperti

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil, standar hidup masyarakat yang terus maju, dan kekuatan nasional yang lebih besar (Huang, 2020).

Temuan bahwa marjinal partisipasi angkatan kerja (*labor force participation*) yang bertambah dapat meningkatkan kesejahteraan melalui produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan lapangan kerja telah mendorong perhatian yang lebih besar terhadap berbagai aspek LFP sebagai sarana untuk mendukung ekonomi di masa depan dan pertumbuhan lapangan kerja. Adanya temuan ini bersamaan dengan reduksi TPAK di Amerika Serikat selama dua dekade terakhir. Dengan semakin terhubungnya pasar tenaga kerja lokal, hambatan terhadap mobilitas tenaga kerja akan berkurang, yang berarti keahlian pekerja dapat lebih sesuai dengan peluang kerja saat ini dan biaya pencarian pekerja akan lebih rendah. Hal tersebut dapat menciptakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan hasil ekonomi secara keseluruhan. Namun demikian, meskipun integrasi pasar tenaga kerja dapat menghasilkan pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi, hal ini juga beresiko meningkatkan kerentanan terhadap guncangan yang merugikan dan mengancam stabilitas. Akibatnya wawasan ini penting bagi para pembuat kebijakan untuk membangun pasar tenaga kerja yang tangguh yang mendukung pertumbuhan, mengurangi risiko, dan menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Beverly et al., 2024).

Penyerapan tenaga kerja yang optimal berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan memasok peluang kerja yang selaras dengan keterampilan dan kualifikasi pekerja. Hal ini sangat relevan untuk menganalisis dinamika pasar tenaga kerja di berbagai negara. Misalnya, di Jerman, Italia, dan Prancis selama periode 1970 hingga 2000, perubahan pola penyerapan tenaga kerja memengaruhi

substansial terhadap tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, karena melibatkan lebih banyak penduduk dalam aktivitas produktif, yang pada akhirnya meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan (Borjas, 2013).

Negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi masalah ketenagakerjaan yang dipicu oleh jumlah penduduk yang besar, yang menyebabkan meningkatnya pencari kerja, angkatan kerja, serta tingkat pengangguran. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan. Tujuan utama pembangunan yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki pemerataan pendapatan dan angkatan kerja yang diukur melalui produktivitas tenaga kerja dan pendapatan riil perkapita. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah perlu fokus terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari kemampuan pemerintah memastikan penyerapan tenaga kerja yang tepat, mengurangi pengangguran, dan membesarkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menggalakkan standar hidup, daya beli, dan pendapatan (Budiasih & Asmara, 2024).

Selain modal dan teknologi, masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen utama faktor produksi. Oleh karena itu, dalam ekonomi makro masalah kesempatan kerja menjadi fokus utama. Dengan populasi 220 juta orang, pengelolaan tenaga kerja menjadi masalah besar di Indonesia. Negara ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi karena memiliki tenaga kerja berkualitas tinggi. Tantangan muncul jika kapasitas produksi dan kualitas tenaga kerja tidak memadai untuk menyanggupi kebutuhan primer semisal makanan, pakaian, dan papan. Jika produktivitas rendah dan penggunaan sumber

daya yang tersedia tidak dikelola dengan baik, keterbatasan ini akan berubah jadi masalah yang signifikan. Karena kurangnya tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, masalah ketenagakerjaan masih ada meskipun populasi cukup besar (Pratiwi & Wijaya, 2024).

Pemerintah sangat memperhatikan masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu masalah utama. Isu ini sangat sensitif dan memerlukan penanganan yang kompleks agar tidak berevolusi menjadi persoalan yang lebih lapang yang dapat membahayakan masyarakat dan keamanannya. Beberapa isu utama yang dihadapi meliputi terbatasnya perluasan kesempatan kerja, adanya kasus pekerja anak, dan tingginya angka pengangguran, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja dan tingkat kompetensi. Hal tersebut hanya sebagian kecil dari kompleksitas masalah ketenagakerjaan yang harus diselesaikan (Muhaimin et al., 2022).

Sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan, setiap warga negara Indonesia berdaulat atas profesi dan kehidupan yang etis. Namun, hingga sampai kini kebanyakan masyarakat Indonesia sedang menghadapi masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak. Isu ini tidak hanya tanggung jawab diktator, tetapi juga bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai masalah ketenagakerjaan, seperti kemiskinan, keterbatasan peluang kerja, dan pengangguran belum dapat diselesaikan dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada modal. Tingkat upah, status pekerjaan, pendapatan dan struktur lapangan kerja yang masih rendah dibandingkan kurangnya kompetensi, produktivitas yang kompetitif, kebutuhan hidup dan berbagai masalah ketenagakerjaan lain yang terkait adalah semua isu ekonomi ketenagakerjaan.

Daya saing perekonomian Indonesia dihalangi oleh mutu SDM yang rendah, yang tercermin dari sedikitnya kemampuan kerja. Masalah seperti kekurangan peluang kerja, pengangguran, dan kemiskinan belum diselesaikan oleh strategi pembangunan ekonomi dan investasi yang berpusat pada pertumbuhan berbasis modal. Salah satu penyebabnya adalah fakta bahwa perekonomian Indonesia adalah negara dengan surplus tenaga kerja yang artinya pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung memberi imbas yang substansial pada pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan di negara tersebut (Situmorang, 2010).

Presentase orang yang bekerja atau aktif mencari kerja dinamakan partisipasi angkatan kerja yang kemudian mengemukakan situasi pasar tenaga kerja dan atmosfer ekonomi di suatu wilayah. TPAK dapat dihitung untuk jumlah tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja didasari dengan kelompok desa, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan (Sianturi et al., 2024). Kinerja sektor ekonomi atau lapangan usaha di suatu wilayah terutama di Pulau Madura sangat terkait dengan kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Kuantitas penduduk yang bekerja menunjukkan kemampuan sektor ekonomi dalam mengambil tenaga kerja, sedangkan tingkat pengangguran menunjukkan keterbatasan sektor ekonomi dalam mengambil tenaga kerja yang tersedia. Harapan setiap orang yakni mewujudkan pekerjaan yang selaras dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Namun terbatasnya lapangan kerja bagi lulusan dengan pendidikan tinggi sering kali menyebabkan mereka tidak terserap dalam sektor usaha yang tersedia (Muhaimin, Setiyono, et al., 2024).

Isu kependudukan merupakan salah satu tantangan sosial yang perlu diperhatikan selama proses pembangunan. Isu tersebut meliputi distribusi

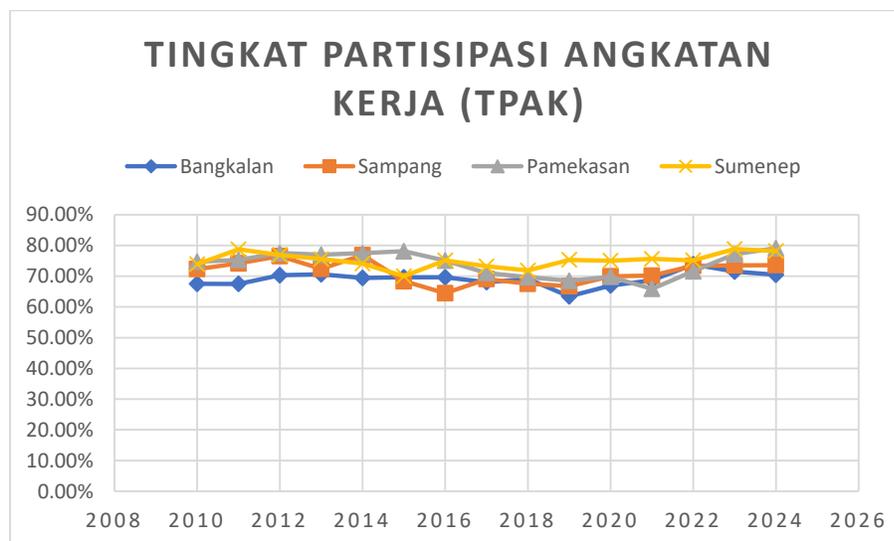
penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan komposisi serta aspek jumlah penduduk sebagai penunjang pembangunan (Muhaimin, Setiyono, et al., 2024). Pulau Madura memiliki penduduk mencapai sekitar 4.156.661 jiwa pada pertengahan tahun 2024 dengan luas keseluruhan sebesar 5.379 km² (BPS, 2024). Pulau Madura terbagi jadi empat wilayah administratif, yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan. Di antara keempatnya, Kabupaten Sumenep memiliki populasi terbesar dengan total 1.143.295 jiwa dengan luas daerah sebesar 1.147km². Diikuti oleh Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.101.556 jiwa pada tahun 2023 dengan luas daerah sebesar 1.260km². Selanjutnya, Kabupaten Sampang dengan populasi sebesar 992.210 jiwa dengan luas daerah sebesar 1.152km². Terakhir yaitu Kabupaten Pamekasan dengan populasi terendah yaitu 862.009 jiwa dengan luas daerah 733km². Kabupaten Pamekasan memiliki 1.114,27 jiwa/km² pada tahun 2023, dengan Kecamatan Pamekasan dengan 3.443,90 jiwa/km² dan Kecamatan Pasean dengan 763,55 jiwa/km². Sekitar 10,33% orang yang tinggal di Pamekasan tinggal di Pamekasan tinggal di daerah ibu kota kabupaten. Pada tahun tersebut, 67,35% orang Pamekasan adalah usia produktif (15-54 tahun), sementara 32,65% adalah usia nonproduktif (0-14 tahun hingga 65 tahun ke atas).

Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik setiap kabupaten di Pulau Madura, Sumenep memiliki TPAK yang tertinggi dari ketiga kabupaten lainnya. Pada tahun 2023 TPAK di Kabupaten Sumenep sebesar 78,86%, atau bisa diartikan ada sekitar 78 sampai 79 dari 100 penduduk sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,98% dari tahun 2022. Pamekasan mengikuti dibawah Sumenep dengan TPAK tertinggi yaitu sebesar

77,14% pada tahun 2023, yang dapat diartikan bahwa sebanyak 77 sampai 78 dari 100 penduduk sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari 2022 sebanyak 3,55%. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Sampang yaitu sebesar 73,54% pada tahun 2023 yang dapat diartikan sebanyak 73 sampai 74 dari 100 penduduk sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Nilai tersebut ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran yang menjadi sebesar 2,72%. Terakhir yaitu Kabupaten Bangkalan yang memiliki nilai TPAK 71,49% atau sebanyak 71 sampai 72 dari 100 penduduk sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Pada hasil survei ditemukan sebanyak 46,55% tenaga kerja yang terserap disektor Pertanian (BPS, 2024).

Gambar 1.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Madura 2010 – 2024



Sumber : BPS (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas menjelaskan bahwa data TPAK tiap Kabupaten di Pulau Madura dalam 13 tahun mulai tahun 2010 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif dimana pada Kabupaten Bangkalan di tahun 2010 sebesar 67,51% naik

sampai dengan 2013 sebesar 70,61% kemudian pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 69,44%. Pada tahun 2015-2016 terjadi peningkatan dan kembali mengalami penurunan 2017. Hal tersebut terjadi pada tahun-tahun selanjutnya hingga menyentuh nilai puncak yakni 73,86% di tahun 2022 dan kembali turun sebesar 70,48% di tahun 2024. Angka tersebut termasuk angka terkecil dari 3 kabupaten lainnya di tahun 2023.

Di Kabupaten Sampang angka TPAK lebih tinggi jika dibanding dengan Kabupaten Bangkalan, meskipun angka TPAK lebih tinggi namun juga mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2010 TPAK di angka 72,30% yang kemudian naik hingga tahun 2012 senilai 76,54% dan turun dari tahun 2013 senilai 72,37%. Hal tersebut terjadi pada tahun-tahun setelahnya hingga akhirnya pada tahun 2019 menyentuh angka 66,74% dan naik hingga tahun 2024 sebesar 73,62%

Selanjutnya pada Kabupaten Pamekasan yang juga mengalami fluktuatif, di tahun 2010 TPAK di angka 74,72% naik hingga tahun 2012 sebesar 77,53% dan turun di tahun 2013 sebesar 77%. Hal tersebut terjadi pada tahun - tahun selanjutnya hingga pada tahun 2021 yang menyentuh angka 65,88% dan naik hingga tahun 2024 sebesar 79,13%

Sama halnya dengan kabupaten sebelumnya, TPAK Kabupaten Sumenep pun juga mengalami fluktuatif yang dimana pada tahun 2010 sebesar 73,90%, kemudian naik di tahun 2011 sebesar 78,76% sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang tahun 2010 – 2024. Tetapi pada tahun 2012 TPAK mengalami penurunan hingga mencapai angka 76,89% lalu mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 75,12%. Hal serupa terjadi di tahun – tahun selanjutnya hingga pada tahun 2024

angka TPAK mencapai angka 78,16%. Angka tersebut juga menjadi angka terbesar dari 3 kabupaten lainnya di tahun 2024.

Tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sumenep dipengaruhi oleh berkembangnya sektor pariwisata, termasuk wisata alam dan wisata religi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja di berbagai sektor. Sumenep dikenal memiliki beragam destinasi wisata seperti Gili Labak, Pantai Lombang, dan kawasan Kepulauan Kangean yang menarik banyak wisatawan dan membuka peluang usaha di bidang transportasi, kuliner, hingga akomodasi. Selain itu, keberadaan wisata religi seperti Asta Tinggi dan makam para tokoh ulama Madura juga menjadi daya tarik tersendiri yang menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Perkembangan sektor pariwisata ini mendorong terciptanya berbagai lapangan kerja baru, baik formal maupun informal, sehingga mendorong lebih banyak penduduk usia kerja untuk terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Sumenep.

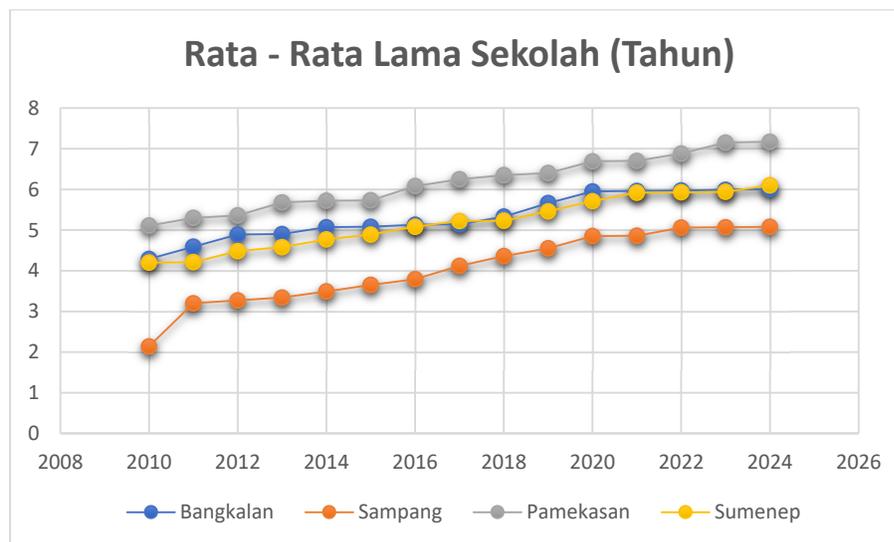
Kapasitas kerja atau produktivitas seseorang meningkat seiring dengan tingkat pendidikannya. Pendidikan formal menjadi syarat teknis yang berdampak pada keberhasilan memperoleh peluang kerja. Di sisi lain, tingkat upah juga berperan signifikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Upah yang lebih tinggi memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kualitas diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan fakta bahwa peluang untuk mendapatkan pekerjaan meningkat seiring dengan kualitas tenaga kerja.

Penelitian ini mengkaji pengaruh tiga variabel utama terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat

upah. Tingkat pendidikan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mencerminkan jumlah tahun rata-rata penduduk menjalani pendidikan formal. Tingkat kesehatan direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup (UHH), yang menunjukkan perkiraan rata-rata usia hidup penduduk sebagai gambaran kualitas kesehatan. Sementara itu, tingkat upah diukur melalui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai indikator kemampuan daya beli dan insentif ekonomi bagi tenaga kerja. Ketiga variabel ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana faktor pendidikan, kesehatan, dan upah memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pasar kerja.

Gambar 1.2

Rata – Rata Lama Sekolah di Pulau Madura 2010 – 2024



Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah)

Tingkat pendidikan di tiap kabupaten di Pulau Madura pada tahun 2010 hingga 2024 mengalami peningkatan seiring berjalannya tahun, dapat kita lihat pada gambar 1.4 meskipun tidak mengalami banyak peningkatan tetapi dipastikan

meningkat setiap tahun. Di Kabupaten Bangkalan menunjukkan tingkat pendidikan naik dari 4,29 di tahun 2010 hingga 6,01 di tahun 2024 yang artinya rata – rata penduduk di Kabupaten Bangkalan yang usianya 25 tahun ke atas sudah mencapai tingkat pendidikan kelas VI – VII (setara dengan kelas 6 SD atau 1 SMP). Pada Kabupaten Sampang juga mengalami peningkatan di tiap tahunnya dari 2010 di angka 2,14 hingga 2024 di angka 5,08 yang artinya rata – rata penduduk di Kabupaten Sampang yang usianya 25 tahun ke atas sudah mencapai tingkat pendidikan kelas V-VI (setara dengan 5 atau 6 SD).

Tidak jauh beda dengan kabupaten sebelumnya, di Kabupaten Pamekasan angka tingkat pendidikan 2010 di angka 5,11 dan pada taun 2024 mencapai angka 7,17 yang artinya rata – rata penduduk di Kabupaten Pamekasan usia 25 tahun ke atas sudah mencapai tingkat pendidikan kelas 2-3 SMP. Meskipun terdapat peningkatan, data menunjukkan bahwa rata – rata penduduk di kelompok usia tersebut berhenti sekolah pada tingkat kelas 2 SMP. Di Kabupaten Sumenep angka RLS juga mengalami peningkatan yakni tahun 2010 sebesar 4,20 hingga tahun 2024 sebesar 6,10 yang artinya rata – rata penduduk berusia 25 tahun ke atas mencapai tingkat pendidikan 6 SD - 1 SMP.

Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi di antara kabupaten lain di Pulau Madura karena beberapa faktor yang saling mendukung. Pertama, Pamekasan merupakan salah satu pusat pendidikan di Madura yang memiliki akses pendidikan yang lebih baik, termasuk keberadaan lebih banyak sekolah menengah atas dan perguruan tinggi swasta maupun negeri. Kedua, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di Pamekasan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang tercermin dari

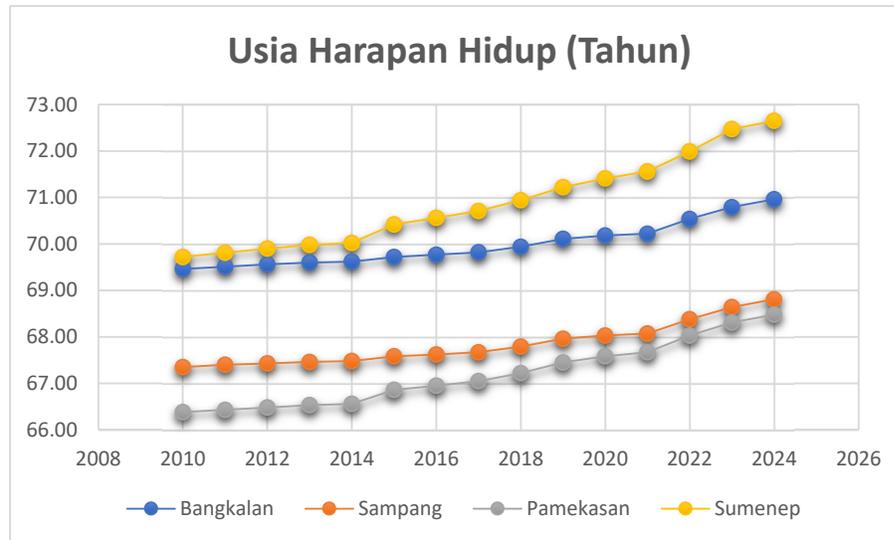
meningkatnya angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan atas.

Selain itu, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk program beasiswa, bantuan pendidikan, dan pembangunan fasilitas sekolah juga turut mendorong peningkatan lama sekolah penduduk. Faktor lain yang berkontribusi adalah peran aktif organisasi keagamaan dan sosial dalam mendorong pendidikan formal, serta semakin kuatnya persepsi bahwa pendidikan penting untuk meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan keluarga. Kombinasi dari akses yang lebih baik, kesadaran masyarakat, serta kebijakan daerah yang pro-pendidikan membuat Pamekasan unggul dalam indikator RLS dibanding kabupaten lain di Madura.

Tingkat pendidikan meningkat tiap tahun diduga disebabkan oleh karakteristik sosial ekonomi. Peningkatan tingkat pendidikan dapat menyebabkan individu menunda masuk ke pasar tenaga kerja, terutama pada kelompok usia muda. Untuk itu dapat dilakukan diversifikasi ekonomi dan juga pengembangan sektor formal di Pulau Madura bisa memperkuat hubungan positif antara Tingkat Pendidikan dan TPAK. Pemerintah perlu merumuskan strategi khusus di bidang pendidikan untuk menciptakan hasil yang lebih optimal. Langkah konkret dan kebijakan dalam memperbaiki kualitas pendidikan diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja.

Gambar 1.3

Usia Harapan Hidup di Pulau Madura 2010 – 2024



Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah)

Jika merujuk pada tabel di atas, terlihat bahwa salah satu komponen indeks kesehatan yakni UHH mengalami peningkatan di tiap kabupaten. Kondisi ini termasuk sebagai salah satu gap pada penelitian yang sedang dibahas ini, dimana pada 4 kabupaten seluruhnya mengalami peningkatan. Di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2010 di angka 69,46 kemudian naik seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2024 menyentuh angka 70,96.

Begitupula dengan Kabupaten Sampang pada tahun 2010 di angka 67,35 tahun dan meningkat meskipun tidak banyak per tahun hingga pada tahun 2024 UHH di Kabupaten Sampang di angka 68,81 tahun. Di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan sepanjang tahun dari 2010 yang sebesar 66,38 tahun hingga tahun 2024 68,48 tahun. Seperti kabupaten – kabupaten sebelumnya, Kabupaten Sumenep juga menunjukkan tren naik di tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2010

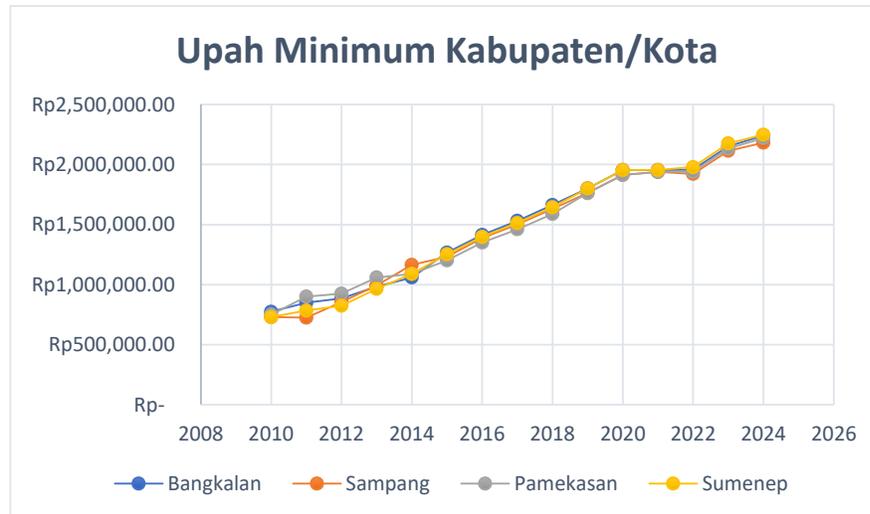
sebesar 69,72 tahun hingga pada tahun 2024 sebesar 72,65 tahun. Dari ke empat kabupaten tersebut memang seluruhnya mengalami peningkatan tiap tahun meskipun tidak banyak tiap tahunnya. Dari data peningkatan tersebut dapat kita lihat bahwa Kabupaten Sumenep memiliki angka UHH lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang lain.

Kabupaten Sumenep memiliki Usia Harapan Hidup (UHH) tertinggi di antara kabupaten lain di Madura karena didukung oleh akses layanan kesehatan yang relatif lebih merata, khususnya di wilayah perkotaan dan kecamatan-kecamatan pesisir. Sumenep juga memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang lebih banyak, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik, dibanding daerah lainnya. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pola hidup bersih juga cenderung lebih baik, terutama karena peran aktif pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam kampanye kesehatan. Faktor geografis yang lebih kondusif, seperti lingkungan yang lebih bersih dan ketersediaan air bersih, turut berkontribusi terhadap kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat angka UHH di Sumenep lebih tinggi dibanding kabupaten lain di Pulau Madura.

Tingkat upah yang sering disebut sebagai Upah Minimum Regional merupakan komponen yang memengaruhi TPAK. Tingkat Upah adalah tolak ukur minimum yang dipakai oleh pelaku industri ataupun pengusaha supaya menggaji karyawan atau pekerja di tempat mereka. Penetapan upah ini dilaksanakan setiap tahun melalui prosedur yang lama (Sarsi et al., 2014). Berikut ini adalah data Tingkat Upah Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui perkembangan.

Gambar 1.4

Tingkat Upah Minimum di Pulau Madura 2010 – 2024



Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan grafik tersebut mengindikasikan bahwa upah minimum di beberapa kabupaten yang dapat dipastikan terdampak peningkatan tiap tahunnya. Di Kabupaten Bangkalan tingkat upah pada tahun 2010 sejumlah Rp. 775.000,- dan terus terjadi lonjakan tanpa mengalami penurunan sekali pun hingga tahun 2024 mencapai Rp. 2.240.701,-. Di Kabupaten Sampang tingkat upah juga terjadi kenaikan dari setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2010 sejumlah Rp. 690.000,- naik hingga pada 2024 sejumlah Rp. 2.182.861,- tanpa adanya penurunan tiap tahun. Selanjutnya di Kabupaten Pamekasan tingkat upah juga mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu yakni dapat dibuktikan berdasarkan data bahwa pada tahun 2010 tingkat upah sejumlah Rp. 750.000,- dan naik tiap tahun, sampai pada tahun 2024 tingkat upah menginjak angka Rp. 2.221.135,. Sama halnya dengan kabupaten sebelumnya, Kabupaten Sumenep juga mengalami peningkatan pada tingkat upah di tiap tahun tanpa mengalami penurunan sekali pun di 13 tahun

terakhir, yakni pada tahun 2010 tingkat upah di angka Rp. 730,000,- naik hingga tahun 2024 di angka Rp. 2.249.113,-.

Sekalipun berubah setiap tahun, tingkat upah di tiap Kabupaten di Pulau Madura mengalami kenaikan, tingkat upah tersebut termasuk dalam golongan rendah apabila dibandingkan dengan tingkat upah kota atau kabupaten lain di Jawa Timur. Dari tingkat upah yang bisa dilihat dari grafik diatas, tingkat upah memengaruhi pengeluaran masyarakat. Pengeluaran masyarakat memiliki hubungan positif terhadap pendapatan individu, seiring bertambahnya pendapatan, maka semakin banyak juga pengeluarannya (Amru & Sihaloho, 2020).

Dalam data yang ditemukan, TPAK di Pulau Madura mengalami fluktuatif di setiap kabupaten. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat kesehatan, serta tingkat upah yang diduga berpengaruh terhadap TPAK di Pulau Madura. Karena dalam data yang didapat, variabel independen di setiap kabupaten di Pulau Madura memiliki tren kenaikan di setiap tahunnya, namun TPAK di setiap kabupaten Pulau Madura tetap fluktuatif. Karena menurut teori Human Capital yang dicetuskan oleh Gary S. Becker, investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan meningkatkan produktivitas individu, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan individu untuk masuk kedalam pasar kerja (Becker, 1993) edisi 3. Semakin tinggi pendidikan yang dicerminkan dengan rata-rata lama sekolah dan tingkat kesehatan yang dicerminkan tingginya angka usia harapan hidup, akan meningkatkan produktivitas manusia. Serta menurut Jacob Mincer terkait teori *Mincer Earning Function* (Mincer, 1976), individu dengan pendidikan tinggi cenderung mendapatkan pengembalian investasi pendidikan yang lebih besar, sehingga cenderung lebih tersdorong untuk masuk ke angkatan kerja.

Selain itu, jika upah di Madura lebih rendah dari daerah lain, maka terjadi migrasi tenaga kerja yang menyebabkan penurunan TPAK lokal. Namun, setelah diperoleh data dari BPS, TPAK di setiap kabupaten di Pulau Madura tetap mengalami fluktuatif meskipun tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, maupun tingkat upah mengalami trend kenaikan.

Berdasarkan interpretasi, dapat diambil kesimpulan bahwa penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna mengeksplorasi aspek – aspek terkait secara lebih rinci yang diwujudkan dalam penelitian dengan judul ”Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Tingkat Upah Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Pulau Madura”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang serta uraian yang sudah disampaikan, maka permasalahan yang peneliti analisis yakni sebagai berikut:

1. Apakah Rata – Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Madura?
2. Apakah Usia Harapan Hidup berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Madura?
3. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Madura?

1.3 Tujuan Masalah

Berlandaskan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis apakah Rata – Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Madura
2. Untuk menganalisis apakah Usia Harapan Hidup berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Madura
3. Untuk menganalisis apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Madura

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis faktor – faktor yang berkontribusi pada perubahan TPAK di Pulau Madura dengan penekanan khusus pada faktor – faktor seperti ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat upah. BPS dan sumber kepustakaan lainnya adalah sumber data yang dipakai dalam penelitian ini.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharap hasil dari penelitian ini bisa membawa manfaat supaya menambah pengetahuan dan referensi dalam penelitian ekonomi tenaga kerja, khususnya tentang komponen TPAK. Serta memberi kontribusi akademik untuk pembangunan teori tentang hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat upah terhadap TPAK. Selain itu untuk menjadi dasar penelitian lanjutan, literatur penelitian serupa harus diperkaya.

2. Manfaat Praktis Bagi Pemerintah:

Studi ini diharap bisa memberikan kritik supaya kebijakan ketenagakerjaan seperti kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, dan upah minimum. Bagi dunia usaha mampu memberikan pemahaman tentang bagaimana tingkat upah minimum dapat memengaruhi ketersediaan tenaga kerja sehingga bisnis dapat menerapkan strategi perekrutan yang lebih efisien. Dan bagi masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai pengelolaan kesehatan dan pendidikan dalam memperkuat daya saing di pasar tenaga kerja.

3. Manfaat Kebijakan:

Penelitian ini mampu menyajikan data empiris yang diberikan kepada para pembuat kebijakan, yang dapat digunakan untuk mengubah strategi pembangunan ekonomi berbasis tenaga kerja. Lalu mampu mendukung pembuatan kebijakan yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, terutama di daerah dengan disparitas pendidikan dan ekonomi.

4. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharap bisa menjadi rujukan untuk siswa, akademisi, dan peneliti yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang topik yang sebanding. Dan mampu memberi contoh analisis yang lebih menyeluruh tentang komponen ekonomi dan sosial dalam konteks pasar tenaga kerja.